

STRATEGI ADAPTIF DAN INKLUSIF DALAM MEMBANGUN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN

Mas Fierna Janvierna Lusie Putri

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia; [*dosen02649@unpam.ac.id](mailto:dosen02649@unpam.ac.id)

^{*)}Corresponding author; E-mail addresses: dosen02649@unpam.ac.id

Abstract. *Indonesia's national education system is currently undergoing a complex transition amid the demands of globalization, technological advancements, and public expectations for a more relevant and inclusive system. This study aims to analyze adaptive and inclusive strategies in building a sustainable national education system. The method used is a qualitative literature study with a thematic analysis approach to policy documents, scientific articles, and relevant institutional reports. The findings indicate that although policies such as *Merdeka Belajar* have been initiated to improve the quality and equity of education, their implementation still faces several challenges, including disparities in teacher quality, limited infrastructure, and digital gaps between regions. Furthermore, 21st-century competency-based education has not yet been fully integrated into the existing learning system. This research emphasizes the importance of a holistic, flexible, and data-driven approach to educational reform in order to address the multidimensional challenges currently faced. The implications of these findings highlight the need to strengthen collaboration between the government, society, and other stakeholders in designing educational strategies that are responsive to changing dynamics and oriented toward long-term equity and sustainability.*

Keywords: *Adaptive, Education System, Inclusive.*

Abstrak. Pendidikan nasional Indonesia saat ini berada dalam masa transisi yang kompleks di tengah tuntutan globalisasi, perkembangan teknologi, dan harapan masyarakat akan sistem yang lebih relevan dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi adaptif dan inklusif dalam membangun sistem pendidikan nasional yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan pendekatan analisis tematik terhadap dokumen kebijakan, artikel ilmiah, dan laporan institusi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan seperti Merdeka Belajar telah diinisiasi untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketimpangan kualitas tenaga pendidik, keterbatasan infrastruktur, dan kesenjangan digital antarwilayah. Selain itu, pendidikan berbasis kompetensi abad ke-21 belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pembelajaran yang ada. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan reformasi pendidikan yang holistik, fleksibel, dan berbasis data untuk menjawab tantangan multidimensi yang dihadapi saat ini. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi pendidikan yang responsif terhadap dinamika perubahan dan berorientasi pada pemerataan serta keberlanjutan jangka panjang.

Kata kunci: Adaptif, Inklusif, Sistem Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan nasional Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang ditandai oleh globalisasi, kemajuan teknologi, dan tuntutan masyarakat akan sistem pendidikan yang inklusif dan relevan. Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertujuan untuk mentransformasi sistem pendidikan agar lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai kendala, seperti ketimpangan kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidik, keterbatasan infrastruktur, dan kesenjangan digital antarwilayah.

Dalam karyanya, Daryanto (2020) menunjukkan bahwa meskipun Merdeka Belajar memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelaksanaannya masih terkendala oleh berbagai faktor. Misalnya, kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum baru masih rendah, terutama di daerah terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap pelatihan dan teknologi. Selain itu, infrastruktur pendidikan yang tidak merata juga menjadi hambatan

serius dalam mencapai pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Menurut Mulyani & Hanani (2023), pendidikan harus mampu mengakomodasi perubahan-perubahan ini dan memberikan pengetahuan yang relevan untuk mendukung kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan global.

Dalam dunia yang semakin terhubung ini, pendidikan menjadi salah satu cara untuk mempersiapkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pasar global, memahami perkembangan teknologi, serta belajar mengenai budaya dan sistem kerja asing (Basri, 2023). Dalam konteks ini, pendidikan harus mampu mengakomodasi perubahan-perubahan ini dan memberikan pengetahuan yang relevan untuk mendukung kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan global. Pendidikan yang responsif akan membantu membentuk generasi yang adaptif, kreatif, dan berdaya saing di era globalisasi. Selain itu, pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti pemecahan masalah, kolaborasi, dan literasi digital menjadi sangat penting untuk diprioritaskan dalam kurikulum (Ginanjari & Purnama, 2023).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi adaptif dan inklusif dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar serta membangun sistem pendidikan nasional yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, mengidentifikasi strategi yang tepat untuk mengatasinya, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti guna memperkuat sistem pendidikan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

Implementasi strategi adaptif dan inklusif dalam kebijakan Merdeka Belajar dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan membangun sistem pendidikan nasional yang berkelanjutan. Penelitian ini memiliki keunikan dalam mengintegrasikan analisis tantangan implementasi kebijakan Merdeka Belajar dengan pendekatan strategi adaptif dan inklusif. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada bukti empiris untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan studi literatur kualitatif yang dilakukan dengan mengkaji dokumen kebijakan, artikel ilmiah, dan laporan institusi terkait pendidikan nasional Indonesia. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder yang valid, termasuk dokumen resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta jurnal ilmiah nasional dan internasional yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (Widyastuti et al., 2023). Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kata kunci seperti “Merdeka Belajar,” “strategi adaptif pendidikan,” “pendidikan inklusif,” dan “sistem pendidikan berkelanjutan.” Kriteria pemilihan sumber data didasarkan pada relevansi isi, keabsahan sumber, serta keterbaruan data untuk memastikan hasil kajian yang mutakhir dan akurat.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis tematik yang dimulai dengan pembacaan menyeluruh terhadap dokumen untuk memahami konteks dan isi. Selanjutnya, data diberi kode untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti tantangan implementasi kebijakan, strategi adaptif, dan inklusif dalam pendidikan nasional. Tema-tema tersebut kemudian disintesis menjadi narasi analisis yang koheren dan sistematis untuk menjawab rumusan

masalah penelitian. Peneliti secara aktif berperan dalam proses seleksi dan interpretasi data, serta melakukan triangulasi dengan berbagai sumber guna meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian. Validasi juga dilakukan dengan membandingkan temuan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu sebagai dasar penguatan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Adaptif dalam Menjawab Tantangan Sistem Pendidikan Nasional

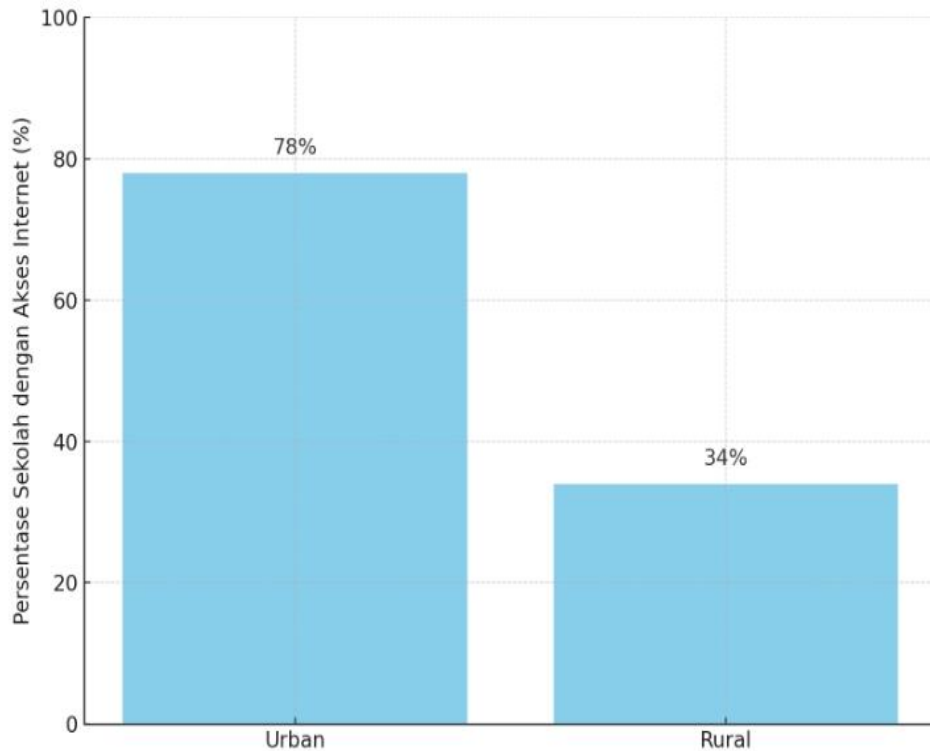
Hasil studi literatur memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah menjadi faktor dominan dalam menentukan arah perkembangan pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Islamiyah (2022), kebijakan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal dan berbasis bukti dapat meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Temuan penelitian Mbato & Sungging (2022) menunjukkan bahwa kebijakan yang terlalu terpusat cenderung gagal merespons keragaman kontekstual antar daerah, sehingga mendorong perlunya desentralisasi kebijakan pendidikan. Di Indonesia, implementasi program desentralisasi melalui otonomi daerah masih menghadapi tantangan dalam bentuk kapasitas kelembagaan dan kesenjangan sumber daya antar wilayah.

Transformasi sistem pendidikan nasional Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar merupakan upaya untuk menciptakan sistem yang lebih adaptif terhadap tantangan global. Hal ini sejalan dengan temuan Daryanto (2020) yang menilai bahwa strategi ini dirancang agar satuan pendidikan memiliki fleksibilitas dalam mengelola kurikulum, metode pembelajaran, dan asesmen sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kondisi lokal. Fleksibilitas ini diharapkan dapat mengakomodasi berbagai bentuk perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan tuntutan kompetensi abad ke-21. Namun, adaptasi tersebut belum berjalan optimal di seluruh daerah karena tidak semua satuan pendidikan memiliki kapasitas yang setara. Sahlberg (2021) menggambarkan bagaimana sebuah negara Nordik kecil membangun sistem sekolah yang menyediakan akses ke pendidikan kelas dunia bagi semua kaum mudanya.

Tidak dapat dipungkiri, tantangan akses terhadap infrastruktur masih besar di wilayah-wilayah terpencil. Rachmadtullah et al. (2020) menekankan bahwa pelatihan tanpa dukungan perangkat dan konektivitas hanya akan memberikan dampak yang minim. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan strategi adaptif ini adalah ketimpangan kualitas guru. Guru merupakan aktor kunci dalam penerapan kebijakan ini, namun kualitas dan kesiapan mereka sangat bervariasi. Di wilayah perkotaan, guru lebih mudah mengakses pelatihan, sumber daya digital, dan komunitas belajar profesional. Sebaliknya, guru di wilayah 3T masih menghadapi berbagai keterbatasan, termasuk dalam hal pelatihan kurikulum merdeka, literasi digital, dan pedagogi kontekstual (Joko, 2020). Ketimpangan ini menyebabkan kesenjangan implementasi yang cukup besar di lapangan.

Selain kualitas guru, masalah besar lainnya adalah keterbatasan infrastruktur pendidikan. Temuan literatur menunjukkan bahwa banyak sekolah, terutama di luar Pulau Jawa, masih kekurangan sarana dasar seperti ruang kelas layak, laboratorium, perpustakaan, dan akses internet (Rahman & Putri, 2023). Infrastruktur yang tidak memadai menghambat pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dan digital yang menjadi inti kebijakan Merdeka Belajar. Di sisi lain, pemerintah pusat cenderung meluncurkan program digitalisasi tanpa pemetaan kebutuhan infrastruktur secara menyeluruh di tingkat lokal (Ginjar & Purnama, 2023). Pemerintah dan pihak terkait harus terus berupaya mengatasi kesenjangan dalam hal akses pendidikan, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, agar pendidikan yang diberikan benar-benar merata dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh

masyarakat (Ayuningtyas, 2021). Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diambil mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif serta sensitif terhadap perbedaan sosial, budaya, dan geografis di Indonesia.



Gambar 1. Akses Internet di Sekolah Menurut Wilayah (2023)
Sumber: Kemendikbudristek (2023), World Bank (2022)

Integrasi teknologi juga terkait erat dengan infrastruktur. Delgado et al. (2020) menegaskan bahwa sekolah dengan jaringan internet stabil dan perangkat digital yang memadai menunjukkan peningkatan hasil belajar hingga 20%. Namun, studi oleh Kemendikbudristek (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi sekolah di Indonesia masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Delgado et al. (2020) menekankan bahwa keterhubungan digital yang stabil memiliki korelasi positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Sayangnya, digitalisasi pendidikan di Indonesia masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sebagaimana diungkap oleh Kemendikbudristek (2023). Kondisi ini menciptakan kesenjangan digital antarwilayah dan memperburuk ketidaksetaraan dalam pencapaian pendidikan. Oleh karena itu, integrasi teknologi ke dalam sistem pendidikan harus diperlakukan tidak hanya sebagai strategi pedagogis, tetapi juga sebagai agenda pembangunan infrastruktur yang strategis dan berkelanjutan.

Kebijakan yang bersifat adaptif semestinya mempertimbangkan keberagaman konteks geografis dan sosial budaya. Namun, dalam praktiknya, strategi adaptasi sering kali masih menggunakan pendekatan satu ukuran untuk semua (*one size fits all*), yang kurang sesuai dengan kondisi lapangan. Banyak guru dan kepala sekolah menyatakan kesulitan dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal karena minimnya pedoman operasional, dukungan pelatihan, dan pendampingan dari dinas pendidikan daerah. Hal ini menunjukkan

lemahnya koordinasi vertikal antara pusat dan daerah dalam mengawal implementasi kebijakan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dibangun mekanisme komunikasi dua arah yang memungkinkan masukan dari daerah menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan di tingkat pusat. Selain itu, pelibatan aktif pemerintah daerah dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan akan memperkuat rasa kepemilikan serta meningkatkan efektivitas implementasi di tingkat akar rumput.

Dari sisi konten pembelajaran, kompetensi abad ke-21 yang menjadi landasan kebijakan ini belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem pembelajaran di kelas. Banyak guru masih mengandalkan pendekatan ceramah dan berorientasi pada hasil ujian, karena kurang memahami strategi pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis proyek. Kurangnya modul, sumber belajar terbuka, serta model asesmen alternatif menyebabkan pelaksanaan kompetensi kritis, kreatif, dan digital hanya terbatas pada level perencanaan. Akibatnya, pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi belum optimal terjadi di ruang kelas. Diperlukan dukungan konkret berupa pelatihan berkelanjutan, pendampingan profesional, dan penyediaan sumber daya pembelajaran yang kontekstual untuk mendorong transformasi pedagogi secara menyeluruh.

Literatur juga menunjukkan bahwa fleksibilitas yang diberikan oleh pemerintah tidak serta-merta disambut baik oleh semua sekolah. Sebagian kepala sekolah merasa ragu mengambil keputusan karena minimnya kapasitas manajerial dan lemahnya dukungan supervisi. Dalam konteks ini, strategi adaptif perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan kepemimpinan pendidikan. Tanpa hal ini, otonomi dalam pengambilan kebijakan justru dapat memperlebar kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan. Penguatan ini mencakup pelatihan berkelanjutan, pendampingan profesional, serta pengembangan jejaring antar sekolah untuk berbagi praktik baik. Selain itu, diperlukan sistem monitoring yang tidak bersifat mengontrol secara kaku, tetapi mendorong refleksi dan perbaikan berkelanjutan di tingkat sekolah.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi adaptif hanya akan efektif apabila dibarengi dengan upaya penguatan sistem pendukung secara menyeluruh. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah, perbaikan infrastruktur, serta kebijakan berbasis bukti yang mempertimbangkan keragaman lokal. Oleh karena itu, pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan implementasi Merdeka Belajar agar benar-benar kontekstual, bertahap, dan berbasis pada kapasitas nyata satuan pendidikan di lapangan. Peningkatan kapasitas, di sisi lain, tidak hanya terbatas pada pelatihan teknis, tetapi juga mencakup penguatan kepemimpinan sekolah, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan pengembangan inovasi berbasis komunitas.

Dengan demikian, strategi adaptif dalam pendidikan tidak boleh dipahami secara sempit sebagai sekadar pelimpahan kewenangan atau bentuk desentralisasi kurikulum kepada pemerintah daerah atau satuan pendidikan. Lebih dari itu, strategi ini harus dipandang sebagai sebuah kerangka kebijakan yang holistik, yang menempatkan dukungan sistemik, pemahaman terhadap konteks lokal, serta upaya berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan lembaga pendidikan sebagai pilar utama keberhasilannya. Dukungan sistemik mencakup penyediaan sumber daya yang memadai, regulasi yang responsif, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan daerah. Sementara itu, pemahaman terhadap konteks lokal menuntut pengakuan atas keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan geografis yang memengaruhi proses belajar-mengajar di berbagai wilayah Indonesia.

Pendekatan Inklusif sebagai Pilar Keberlanjutan Pendidikan Nasional

Pembangunan sistem pendidikan nasional yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada strategi adaptif, tetapi juga menuntut adanya pendekatan yang inklusif. Inklusivitas dalam pendidikan berarti bahwa seluruh peserta didik, tanpa terkecuali, harus memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Namun, dari hasil kajian, tampak bahwa pendekatan inklusif dalam kebijakan pendidikan nasional masih belum sepenuhnya operasional di berbagai wilayah. Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak dari keluarga miskin, dan komunitas adat masih mengalami berbagai hambatan dalam mengakses layanan pendidikan yang layak.

Salah satu persoalan utama dalam mewujudkan inklusivitas adalah belum adanya kerangka kerja operasional yang komprehensif pada tingkat satuan pendidikan. Banyak sekolah belum memiliki sistem yang mendukung pembelajaran diferensiatif, ruang inklusi, atau guru yang memiliki keahlian dalam pendidikan khusus (Budianto, 2023). Ketiadaan sarana tersebut menyebabkan banyak anak dengan kebutuhan khusus terpaksa tidak melanjutkan pendidikan atau menjalani proses belajar yang tidak optimal. Ini menjadi bukti bahwa pendekatan inklusif belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat mikro. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan sekolah dalam penyediaan layanan inklusif turut memperparah ketimpangan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk menjadikan inklusivitas sebagai bagian integral dari sistem pendidikan, diperlukan komitmen anggaran, regulasi yang jelas, serta dukungan teknis yang berkelanjutan bagi sekolah-sekolah di seluruh wilayah.

Selain masalah fasilitas, pendekatan inklusif juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Sayangnya, banyak kebijakan pendidikan masih bersifat top-down dan tidak melibatkan masyarakat secara bermakna. Kurangnya dialog antara pemerintah dan komunitas pendidikan menyebabkan kebijakan sering tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Rahmat (2021) menyatakan bahwa ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan, maka rasa kepemilikan terhadap program pendidikan pun menurun, yang berdampak pada lemahnya keberlanjutan pelaksanaan.

Dalam konteks digitalisasi pendidikan, pendekatan inklusif juga belum sepenuhnya diadopsi. Sebagian besar program digitalisasi masih menyasar sekolah dengan kesiapan infrastruktur, sementara daerah tertinggal tertinggal dalam agenda ini. Akibatnya, kesenjangan digital terus melebar dan menyebabkan ketimpangan hasil belajar. Padahal, teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menjangkau kelompok yang selama ini terpinggirkan, asalkan dirancang dengan pendekatan keadilan sosial. Untuk itu, kebijakan digitalisasi perlu disertai dengan peta jalan yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik wilayah tertinggal dan kelompok rentan. Selain itu, penting untuk melibatkan komunitas lokal dalam proses perancangan dan implementasi teknologi agar solusi yang dihasilkan benar-benar kontekstual dan berkelanjutan.

Literatur juga menunjukkan bahwa inklusivitas tidak hanya terkait akses, tetapi juga mencakup penerimaan dan keberhasilan peserta didik dalam proses belajar. Sistem asesmen yang seragam, kurikulum yang tidak fleksibel, dan minimnya pelatihan guru tentang keberagaman kerap menjadi hambatan dalam menciptakan iklim belajar yang mendukung semua peserta didik (Firman & Gunawan, 2023). Dalam banyak kasus, siswa dari latar belakang marginal cenderung memiliki hasil belajar yang lebih rendah bukan karena kemampuan mereka, tetapi karena sistem pendidikan yang tidak inklusif. Oleh karena itu,

penting untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang diferensiasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta potensi setiap peserta didik. Guru perlu dibekali dengan kompetensi yang memadai untuk mengelola keberagaman di kelas secara efektif dan empatik. Selain itu, revisi kebijakan asesmen harus mempertimbangkan variasi kemampuan dan konteks sosial peserta didik agar evaluasi hasil belajar menjadi lebih adil dan bermakna.

Keterlibatan lintas sektor menjadi elemen penting dalam penguatan strategi inklusif (Kartika et al., 2023). Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri; peran organisasi masyarakat sipil, lembaga non-profit, sektor swasta, dan keluarga sangat dibutuhkan. Kolaborasi ini harus difasilitasi melalui kebijakan yang mendukung, pendanaan yang memadai, dan sistem koordinasi yang efektif. Tanpa adanya sinergi antar pemangku kepentingan, inklusivitas hanya akan menjadi jargon yang sulit diwujudkan. Untuk itu, perlu dibangun ruang dialog yang terbuka dan partisipatif agar setiap pihak dapat menyuarakan kebutuhan serta kontribusinya secara setara. Pendekatan kolaboratif ini juga harus dilandasi oleh komitmen bersama untuk menjadikan inklusi sebagai prinsip dasar dalam setiap kebijakan dan praktik pendidikan.

Membangun pendidikan inklusif juga membutuhkan pendekatan berbasis data. Sistem informasi pendidikan harus mampu memetakan kelompok rentan dan kondisi real di tiap daerah secara akurat, agar intervensi bisa lebih tepat sasaran. Dengan data yang baik, perencanaan menjadi lebih responsif dan efisien. Ketiadaan data yang memadai selama ini menjadi hambatan besar dalam mendesain program inklusi yang efektif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengelolaan data di tingkat lokal menjadi sangat penting. Selain itu, kolaborasi antarinstitusi juga diperlukan untuk memastikan integrasi dan keterpaduan data yang mendukung pengambilan keputusan.

Dengan demikian, inklusivitas adalah fondasi utama bagi keberlanjutan pendidikan. Sistem yang tidak inklusif akan terus memproduksi ketimpangan dan memperkuat siklus eksklusif sosial. Oleh karena itu, strategi pendidikan nasional harus secara eksplisit memasukkan pendekatan inklusif sebagai elemen inti, bukan sebagai tambahan. Inklusivitas harus dijadikan prinsip dalam setiap kebijakan, program, dan praktik pendidikan jika Indonesia ingin mencapai pembangunan pendidikan yang benar-benar berkelanjutan. Inklusivitas juga harus dimaknai secara luas, mencakup akses, partisipasi aktif, serta hasil belajar yang setara bagi semua kelompok, tanpa diskriminasi. Hal ini menuntut keberanian untuk mereformasi sistem yang masih bias terhadap kelompok mayoritas dan kurang responsif terhadap keragaman kebutuhan peserta didik. Hanya dengan komitmen yang kuat dan konsisten dari semua pemangku kepentingan, visi pendidikan yang adil dan berkelanjutan dapat benar-benar terwujud.

SIMPULAN

Dalam menghadapi tantangan pendidikan di era global yang kompleks dan terus berubah, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan kontekstual. Dua pendekatan yang semakin relevan dalam konteks ini adalah strategi adaptif dan inklusif. Strategi adaptif dan inklusif merupakan pendekatan kunci dalam membangun sistem pendidikan nasional yang berkelanjutan di Indonesia. Strategi adaptif perlu didukung oleh penguatan kapasitas guru, pemerataan infrastruktur, serta kebijakan yang responsif terhadap keragaman konteks lokal. Sementara itu, pendekatan inklusif harus diwujudkan melalui perluasan akses pendidikan, penerimaan terhadap keberagaman, dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada integrasi kedua pendekatan tersebut dalam satu kerangka analitis yang menyeluruh, yang sejauh ini belum

banyak dikaji secara terpadu dalam literatur sebelumnya. Oleh karena itu, disarankan agar reformasi pendidikan nasional tidak hanya berfokus pada aspek struktural, tetapi juga menekankan transformasi paradigma menuju sistem yang berbasis bukti, partisipatif, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Penelitian lebih lanjut perlu diarahkan pada studi longitudinal mengenai efektivitas kebijakan pendidikan di berbagai konteks lokal, serta eksplorasi mendalam terhadap dampak integrasi teknologi terhadap hasil belajar, khususnya di daerah terpencil. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional dapat terus diperkuat untuk mendorong transformasi yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., Purnama, W. W., Ramadianto, A. Y., Effendy, F. S. W., Bagus, M., Anggraeni, R., ... & Ihsan, M. (2023). *Ilmu hukum konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi negara*. Yogyakarta: Balai Literasi Bangsa.
- Ayuningtyas, I. (2021). Ketimpangan akses pendidikan di Kalimantan Timur. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 117-129.
- Basri, H. (2023). Dampak Globalisasi Terhadap Sistem Pendidikan: Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 128-143. <https://doi.org/10.62086/al-murabbi.v1i1.446>
- Budianto, A. A. (2023). Pentingnya pendidikan inklusif: Menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua siswa. *Jurnal Kajian Pendidikan Dan Psikologi*, 1(1), 12-19. <https://doi.org/10.61397/jkpp.v1i1.10>
- Daryanto. (2020). *Pengembangan teknologi pembelajaran*. Yogyakarta: Gava Media.
- Delgado, A., Wardlow, L., McKnight, K., & O'Malley, K. (2020). The impact of digital learning on student achievement. *Journal of Educational Technology*, 49(2), 111–125.
- Firman, M., & Gunawan, U. (2023). LEADERSHIP OF SCHOOL PRINCIPLE IN DEVELOPING EDUCATION MANAGEMENT STANDARDS AT MTS YASPIDA SUKABUMI. *Indonesian Journal of Educational Development (IJED)*, 4(2), 259-265. <https://doi.org/10.59672/ijed.v4i2.2973>
- GINANJAR, D., & Purnama, W. W. (2023). Optimizing Legal Strategies: Combating Corruption through Anti-Corruption Education in Universities. *Veteran Law Review*, 6(2), 122-132. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6i2.6477>
- GINANJAR, D. (2023). The Effect of Online Learning on Student Achievement in Elementary Schools in Indonesia. *Eastasouth Proceeding of Humanities and Social Sciences*, 1(01), 43-52. <https://doi.org/10.58812/ephss.v1i01.39>
- Islamiyah, N. M. (2022). Implementasi Program Sekolah Penggerak dalam Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar (Studi Kasus di Sekolah Dasar Kota Bima, NTB. *Master's thesis*, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Joko, B. S. (2020). Strategi mgmp sekolah menengah pertama dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di tengah berbagai kendala (Studi kasus di Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 13(2), 109-128. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v13i2.375>
- Kartika, I., Firman, M., Margono, M., & Rohman, A. (2023). SCHOOL PRINCIPALS' RESPONSES AND CHALLENGES IN THE IMPLEMENTATION OF PERMENDIKBUDRISTEK NUMBER 40 OF 2021.

- Indonesian Journal of Educational Development (IJED)*, 4(2), 230-237.
<https://doi.org/10.59672/ijed.v4i2.3016>
- Kemendikbudristek. (2023). *Laporan capaian program Merdeka Belajar tahun 2023*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Mulyani, D. S., & Hanani, S. (2023). DINAMIKA SOLIDARITAS MEKANIS DAN SOLIDARITAS ORGANIK DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN: PERSPEKTIF DURKHEIMIAN. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 7(2), 65-83. <https://doi.org/10.20961/habitus.v7i2.80141>
- Purnama, W. W. (2020). Tantangan dan Peluang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading di Pasar Modal. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 10(2), 134-141.
- Purnama, W. W. (2021). Efektivitas Peraturan Pertanahan dalam Menangani Pelanggaran Penggunaan Tanah tanpa Izin. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 14(02), 42-48.
- Purnama, W. W. (2022). Implementasi Pendistribusian Royalti: Strategi Inovatif Untuk Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 12(1), 189-198.
- Purnama, W. W. (2022). Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia: Pandangan Regulator dan Implikasi Hukum bagi Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 15(02), 96-101.
- Purnama, W. W. (2023). Tantangan Perlindungan Dana Nasabah pada Layanan Equity Crowdfunding di Era Industri 4.0: Analisis Peraturan OJK. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 6(2), 174-183.
- Rachmadtullah, R., Sumantri, M. S., & Pohan, N. (2020). Teacher training in the digital age: Case from Indonesian schools. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 15(4), 123–130.
- Rahmat, A. (2021). *Hubungan sekolah dan masyarakat: mengelola partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Sahlberg, P. (2021). *Finnish lessons 3.0: What can the world learn from educational change in Finland?*. Teachers College Press.
- Sopiansyah, D., Masruroh, S., Zaqiah, Q. Y., & Erihadiana, M. (2022). Konsep dan implementasi kurikulum MBKM (merdeka belajar kampus merdeka). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 34-41. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.458>
- Suhandi, M. F., Ginanjar, D., & Agustin, S. (2023). Higher Education As An Anti-Corruption Forming Agent. *The Eastasouth Journal of Learning and Educations*, 1(01), 22-29. Retrieved from <https://esj.eastasouth-institute.com/index.php/esle/article/view/68>
- Sunandi, I., Alwasili, A., Saputra, D., & No, J. P. I. (2023). Penerapan Blended Learning pada Pelajaran PPKn di SMAN 2 Sukabumi. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(2), 206-213. <https://doi.org/10.59061/guruku.v1i2.339>
- Verger, A., Fontdevila, C., & Zancajo, A. (2016). *The privatization of education: A political economy of global education reform*. Teachers College Press.

- Widiyastuti, N. E., Sanulita, H., Waty, E., Qani'ah, B., Purnama, W. W., Tawil, M. R., ... & Rumata, N. A. (2023). *Inovasi & Pengembangan Karya Tulis Ilmiah: Panduan Lengkap Untuk Penelitian dan Mahasiswa*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- World Bank. (2022). *Indonesia education public expenditure review*. Washington, DC: World Bank.